

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan BPR sangat penting karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi BPR untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan BPR secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai BPR dan kepercayaan di mitra usaha.

PJOK Nomor 4/PJOK.03/2015 juga menyebutkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam BPR menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)

Semakin baik pelaksanaan *Good Corporate Governance* maka akan memberikan implikasi terhadap semakin baiknya kinerja manajerial. Masing-masing prinsip *Good Corporate Governance* perlu diterapkan dengan baik agar *Good Corporate Governance* dalam bank tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dengan adanya *Transparency* yang ditunjang dengan payung hukum yang jelas maka akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan bank sehingga kepercayaan publik terhadap bank semakin baik. Dengan adanya *fairness* maka semua hak dan kepentingan publik akan terpenuhi tanpa ada perbedaan sehingga tidak ada benturan-benturan kepentingan yang terjadi dan target bank tercapai dengan baik. Dengan adanya *accountability* publik sebagai pihak yang memerlukan informasi akan dapat mengetahui tingkat

pencapaian misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya *responsibility* diharapkan akan menyadarkan manajer dalam melaksanakan kegiatannya agar menjadi lebih profesional dan penuh etika, terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan dukungan semua pihak, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan lebih menjamin kinerja manajerial secara kuat dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan instrument pokok entitas dalam mencapai kinerja manajerial yang baik. (Lina Triadi, 2016).

Selain dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, pengendalian intern juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial. Pengendalian intern sangat berperan penting dari fungsi manajemennya, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang tepat. (Dalam Syintia, 2014).

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan dengan dewan komisaris, manajemen, dan personil usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan (IAI, 2001). Oleh karena itu perusahaan besar dan perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan peranan pengendalian intern yang lebih besar juga. Karena semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak pula orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perusahaan yang dispesifikasikan dalam bidang-bidang tertentu, maka memungkinkan munculnya kesalahan yang dapat terjadi. Di dalam pengendalian intern, kinerja manajemen sangatlah penting karena merupakan inti dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Pengendalian intern yang efektif merupakan komponen manajemen organisasi yang penting dan mendasar untuk operasi yang baik dan aman. Jadi dengan pelaksanaan pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh pada peningkatan kinerja manajerial. Dibutuhkan penendalian intern yang handal untuk memastikan adanya pemisahan tugas, garis otoritas, serta kebijakan dan prosedur terkait yang jelas. (Pratolo, 2006 dan Tuati, 2007)

Sistem pengendalian intern yang efektif mampu menghindarkan organisasi dari kerugian besar dan sebaliknya tanpa sistem pengendalian intern yang efektif maka kendala atau resiko yang dapat mengakibatkan kerugian besar dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi oleh pemilik organisasi (dalam Syintia, 2014).

Dalam ketentuan pasal 26 ayat (1) peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang *Good corporate Governance* menyatakan bahwa “direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan “. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan mewajibkan agar manajemen membuat serta menjalankan suatu kerangka pengendalian internal yang baik.

Manajer merupakan ujung tombak pelaksana kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan sebuah perusahaan salah satu nya dapat diukur melalui kinerja manajerialnya. Kinerja manajerial diartikan sebagai salah satu faktor penting dalam perusahaan, karena dengan meningkatnya kinerja manajerial diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja manajerial yang diperoleh manajer juga merupakan salah satu

faktor yang dapat di pakai untuk meningkatkan keefektifan perusahaan. Kinerja manajerial menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan fungsi manajemen yang merupakan aktivitas bisnis, yang tentu selalu berkenaan dengan pengambilan keputusan. Seseorang yang memegang posisi manajerial di harapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial yang optimal. (dalam Syintia, 2014).

Kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam mengelolah perusahaan dan mampu membuat keputusan-keputusan yang memberi nilai tambah bagi perusahaannya. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 1963 dalam Syintia 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Rustiana (2004) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Strategi Dan Budaya Perusahaan Terhadap Kinerja Manajer Di PT Kimia Farma Apotek: *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Intervening”, menunjukkan bahwa adanya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja manajer.

Penelitian yang dilakukan oleh Tuati (2007) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Kupang)” menjelaskan bahwa desentralisasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pimpinan dinas pada pemerintah Kota Kupang. Artinya, apabila semakin tinggi tingkat desentralisasi

dan pelaksanaan pengendalian intern yang baik maka akan meningkatkan kinerja para pimpinan dinas pada pemerintah Kota Kupang.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Surya (2007) dengan judul “*Good Corporate Governance* dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variable Eksogen serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan” menyimpulkan bahwa audit manajemen, pengendalian intern, dan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh langsung baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja perusahaan namun dengan parsial yang lemah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Mayla Pramono dan Raharja (2012) dengan judul “Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Layanan Umum(BLU) di Indonesia”, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU).

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyanto (2013) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Manajerial (Study Empiris pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Jember”, menjelaskan bahwa : 1) Pengendalian Intern menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. 2) *Good Corporate Governance* mwnunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan Syintia (2014) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap

Kinerja Manajerial pada PT PLN (Persero) Wilayah Riau Area Pekanbaru” menunjukkan bahwa 1) Pengendalian Intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial 2) penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Andriyani Pratiwi (2016) dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance Pada Kinerja Berbasis Balanced Scorecard pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung”, menunjukkan bahwa, prinsip-prinsip GCG berpengaruh terhadap kinerja berbasis *balanced scorecard* pada Bank Perkreditan Rakyat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Syintia (2014), meneliti tentang “Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Manajerial pada PT PLN (Persero) Wilayah Riau Area Pekanbaru”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya Syintia menggunakan objeknya PT PLN (Persero) Wilayah Riau Area Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah PT BPR di Kota Pekanbaru.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. (PJOK Nomor 4/PJOK.03/2015, pasal 1).

BPR seringkali menjadi sorotan OJK dengan perannya yang cukup strategis dalam menyediakan jasa pelayanan perbankan hingga ke masyarakat di daerah-daerah. Hal tersebut menjadikan BPR dianggap sebagai partner pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan demografi ekonomi Indonesia yang lebih dari 90%-nya adalah masyarakat ekonomi level mikro, maka terang saja jika peran BPR sangat diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat.

Disamping perannya yang strategis, terdapat sejumlah fakta yang perlu diperhatikan. Sejak mulai berdiri di Tahun 2006, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melikuidasi 69 bank yang 68 diantaranya adalah Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, data terakhir di Tahun 2016 menyebutkan bahwa dari 26 kasus tindak pidana perbankan yang ditangani oleh OJK sepanjang Tahun 2016, 80% diantaranya menjerat BPR sedangkan sisanya dilakukan oleh bank umum. Jika dipecah berdasarkan jenis kasusnya, tindak pidana perbankan tersebut didominasi oleh kasus kredit sebesar 55%, dan selebihnya merupakan kasus rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%), dan pengadaan aset (4%). (sumber: LPS.go.id)

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa kualitas manajemen organisasi di BPR masih jauh dibawah bank umum. Hal tersebut menyebabkan banyaknya *fraud* didalam badan organisasi, bahkan sering terjadi kecurangan eksternal (*external fraud*) yang difasilitasi oleh pihak internal, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam kegiatan operasional BPR yang berujung pada likuidasi. Fakta bahwa sebagian besar BPR terlikuidasi karena *fraud* inilah yang mendorong OJK

mengeluarkan sejumlah peraturan untuk memperbaiki kualitas manajemen organisasi dan memperketat pengawasan BPR seperti POJK tentang Tata Kelola BPR (Nomor 4/POJK.03/2015) dan tentang Manajemen Risiko BPR (Nomor 13/POJK.03/2015).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK.03/2015 menjelaskan bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula risiko Bank Perkreditan Rakyat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Uraian dan juga ketidak konsistenan hasil penelitian diatas, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. BPR di Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut , maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial PT. BPR di Kota pekanbaru?
2. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja manajerial PT. BPR di Kota Pekanbaru?
3. Apakah pengendalian intern dan Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja manajerial PT. BPR di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan membuktikan:

1. Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja manajerial PT. BPR di Kota Pekanbaru.
2. Pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja manajerial PT. BPR di Kota Pekanbaru.
3. Pengaruh pengendalian intern dan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja manajerial PT. BPR di kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pengendalian intern dan penerapan *Good Corporate Governance* dan untuk mengetahui kinerja manajerial. Dengan di terapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan tambahan keyakinan akan peningkatan kinerja dan untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis terutama mengenai pemahaman pengendalian intern dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja manajerial PT. BPR di Kota Pekanbaru.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan wacana dan referensi tentang pengendalian intern dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja manajerial.

D. Sistematika Penulisan

Untuk melihat secara menyeluruh mengenai penulisan ini agar dapat dikembangkan dengan kerangka skripsi, penulis mencoba menguraikan pokok-pokok yang ada pada masing-masing item atau bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini memuat tinjauan pustaka, yang menguraikan landasan teori dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, variable penelitian dan defenisi, Penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah umum perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau